

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Open Society Foundations merupakan organisasi yang didirikan oleh George Soros, bertujuan untuk mengubah masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka yang dicirikan oleh perkembangan masyarakat sipil dan pemerintahan demokratis, selain itu konsep masyarakat terbuka juga mengandung aspek penghormatan hak asasi manusia dan hak minoritas, serta pemisahan antara peran pasar dan negara. Dasar-dasar Yayasan Soros adalah lembaga mandiri yang didirikan di negara yang mendukung kegiatan masyarakat terbuka. Program kerja Yayasan Soros ini berlangsung sejak runtuhnya komunisme dan dewasa ini Yayasan Soros beroperasi di lebih dari tujuh puluh negara.

Membangun iklim demokrasi yang hidup dan toleran agar pemerintah memberikan perubahan nyata di masyarakat merupakan misi dari Open Society Foundations. Untuk mewujudkan misi ini dasarnya adalah mencari bentuk keadilan yang mengedepankan kebijakan publik yang lebih besar dalam politik, hukum dan sistem yang melindungi hak-hak fundamental ekonomi. Open Society Foundations dengan berbagai inisiatif baru berupaya meningkatkan keadilan, pendidikan dan media massa independen serta membangun aliansi dan kerjasama baik secara domestik

Open Society Foundations adalah organisasi yang menawarkan konsep masyarakat terbuka yang dilandasi dengan terpenuhinya hak-hak sipil, namun konsep ini sangat bertolak belakang dengan ideologi negara yang dikuasai pemerintahan junta militer yang notabene sangat tertutup dan anti masyarakat sipil seperti di Myanmar, perbedaan dalam aspek ideologi ini tentu sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Bagaimana sebuah Non-Governmental Organization dengan nilai-nilai baru yang sangat bebas dan terbuka berupaya memberikan pengaruh dalam demokrasi di negara yang dikuasai rezim militer yang sangat tertutup. Dengan melakukan pendekatan dengan konsep Global Civil Society, Open Society Foundations diharapkan bisa menggantikan peran negara dalam memberikan perubahan terhadap proses demokratisasi di Myanmar.

Melalui komitmen tersebut, sampai saat ini Open Society Foundations terus mendukung prakarsa Myanmar dalam melakukan transisi dan konsolidasi demokrasi, perbaikan pelayanan pemerintah, dan kebebasan berpendapat. Sebagai organisasi yang berasal dan berpusat di Amerika Serikat, tentunya Open Society Foundations juga terkait dengan penyebaran demokrasi yang didukung oleh negara asalnya tersebut apalagi organisasi ini adalah organisasi yang didirikan oleh George Soros yang dikenal dunia sebagai tokoh yang aktif menyuarakan demokrasi dan kebebasan. Apa yang telah dilakukan Open Society Foundations dalam rangka

Berangkat dari pertanyaan tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengangkat judul "Peran Open Society Foundations Dalam Demokratisasi di Myanmar Pasca Penolakan Hasil Pemilu Nasional Myanmar Tahun 1990" sebagai objek penelitian.

### **B. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Mengetahui peran Open Society Foundations sebagai Global Civil Society dalam proses demokratisasi di Myanmar.
2. Mengetahui permasalahan demokrasi dan peran *Non Governmental Organization* terhadap konsolidasi masyarakat sipil di Myanmar.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Istilah "Non-Governmental Organization" digunakan sejak berdirinya PBB pada tahun 1945. Walaupun sejak lebih dari dua dekade terakhir sektor Non-Governmental Organization telah semakin di profesionalisasikan, namun prinsip-prinsip mementingkan orang lain dan kesukarelaan masih menjadi ciri utamanya. Dalam dasawarsa terakhir Non-Governmental Organization dianggap sebagai pengawal pembangunan yang merupakan inti dari masyarakat sipil yang aktif dan mendorong pelayanan publik serta mendukung gelombang demokratisasi yang hampir tak terbendung. Oleh karena itu peranan Non-Governmental Organization dianggap sangat penting dalam tata kelola negara demokrasi.

Open Society Foundations adalah organisasi yang tidak terikat dengan negara dan terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dengan sukarela bergabung dan mempunyai tujuan yang sama dalam mendorong dan memajukan komponen masyarakat sipil dalam aliansi masyarakat terbuka. Peran dan kriteria tersebut mencirikan bahwa Open Society Foundations adalah sebuah Non-Governmental Organization yang mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah kemanusiaan berdasarkan asas kesukarelaan.

Sebagai bagian dari jaringan Yayasan Soros, Open Society Foundations berupaya mempromosikan masyarakat terbuka yang dicirikan dengan tidak adanya penindasan terhadap masyarakat sipil. Hal tersebut berupaya dilakukan dengan cara berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan melakukan reformasi sosial, hukum, dan ekonomi. Selain itu Open Society Foundations juga mendukung pendidikan, media massa yang independen dan kesehatan masyarakat, serta hak-hak untuk perempuan.<sup>1</sup>

Tujuan Open Society Foundations adalah untuk mengubah masyarakat tertutup ke masyarakat yang terbuka dan untuk melindungi dan memperluas nilai-nilai masyarakat terbuka yang ada. Masyarakat terbuka mengandung arti kebebasan, demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia, keadilan

---

<sup>1</sup> Tentang Open Society Foundations tersedia di <http://www.soros.org/about> diakses pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012.

sosial dan tanggung jawab sebagai ide universal. Salah satu yang menjadi penghalang terbesar bagi penerimaan masyarakat terbuka sebagai tujuan besar adalah penolakan cukup luas terhadap ide ide universal (*universal ideas*) tersebut.<sup>2</sup>

Oleh karena itu lembaga mandiri ini berfokus memberikan bantuan guna memperbaiki kebijakan publik yang menunjang terciptanya iklim demokrasi, penghargaan hak asasi manusia, serta reformasi sosial, hukum dan ekonomi. Open Society Foundations adalah organisasi yang bekerja untuk membangun demokrasi yang hidup dan toleran agar pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan misi ini dasarnya adalah mencari bentuk keadilan yang mengedepankan kebijakan publik yang lebih besar dalam politik, hukum dan sistem yang melindungi hak-hak fundamental ekonomi. Di tingkat paling kecil Open Society Foundations dengan berbagai inisiatif baru berupaya meningkatkan keadilan, pendidikan, kesehatan masyarakat dan media independen. Pada saat yang sama juga membangun aliansi di seluruh wilayah di berbagai permasalahan seperti korupsi dan kebebasan informasi.<sup>3</sup>

Fokus peran Open Society Foundations di kawasan Asia Tenggara adalah hak asasi manusia, pekerja migran, buruh dan korban konflik. Selain itu Open Society Foundations juga memiliki peran dalam mempromosikan

---

<sup>2</sup> George Soros. *Open Society : Reforming Global Capitalism*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Bekerjasama dengan Pusat Penerjemah Nasional UNAS Jakarta ,2007 hlm : 130  
<sup>3</sup> About Open Society Foundations *Loc.Cit* ,

reformasi pemilihan umum, melembagakan kebijakan sumber daya alam, meningkatkan akses informasi serta meningkatkan kesehatan publik. Atas dasar inilah Open Society Foundations sebagai sebuah Non-Governmental Organizations berkomitmen membangun masyarakat Myanmar yang makmur dan terbuka. Open Society Foundations merasa terpanggil untuk membantu masyarakat Myanmar melalui program-program penguatan masyarakat sipil dan berbagai bantuan kepada lembaga-lembaga kemitraanya yang tersebar diseluruh dunia.

Isu politik dalam negeri Myanmar telah memunculkan berbagai macam pandangan yang berbeda-beda mengenai penyelesaian maupun implikasi dari masalah-masalah tersebut. Sebagai negara yang masih dikuasai junta militer bukan berarti tidak ada gerakan pro demokrasi di Myanmar, upaya-upaya untuk menghidupkan iklim demokrasi semakin intens dilakukan.

Pada pemilu nasional Myanmar tahun 1990 Partai *National League of Democracy* (NLD) dengan cepat berhasil memposisikan diri sebagai partai paling populer karena mampu menggalang dukungan selama masa kampanye, namun berkaitan dengan pernyataan Aung San Suu Kyi pada masa kampanye yang ingin menyerukan boikot nasional terhadap proses ekonomi maka Aung San Suu Kyi selaku pimpinan partai dikenakan tahanan rumah oleh pemerintah Myanmar pada tanggal 29 juli 1989 karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan nasional. Namun diluar dugaan ternyata Partai *National League of Democracy* (NLD) justru memenangkan pemilu

yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 1990 dengan meraih 82 % suara pemilihan atau 392 kursi dari 485 kursi yang ada di parlemen nasional.<sup>4</sup>

Selanjutnya pemerintahan militer dibawah kendali *State Law and Order Restoration Council* (SLROC) menolak mengakui hasil pemilu yang mencatat kemenangan oposisi Partai *National League of Democracy* (NLD) dan secara sistematis melemahkan posisi Partai *National League of Democracy* (NLD) dengan melakukan penahanan rumah terhadap sejumlah pemimpin Partai baik yang sudah dicalonkan sebagai anggota parlemen maupun yang tidak dicalonkan. Kendati tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum militer telah lama terjadi di Myanmar, namun fenomena pembatalan hasil pemilu nasional Myanmar tahun 1990 dengan segera menjadikan isu demokratisasi di Myanmar serta pelanggaran HAM terhadap tokoh tokoh demokrasi terutama Aung San Suu Kyi, termasuk juga tindakan kekerasan terhadap minoritas sebagai isu internasional.<sup>5</sup>

Sejak pembatalan hasil pemilu nasional Myanmar tahun 1990 yang menjadi isu internasional banyak negara maupun organisasi yang mendukung prakarsa Myanmar dalam proses demokratisasi termasuk juga organisasi Open Society Foundations.

---

<sup>4</sup> Pelanggaran HAM dan Demokrasi yang terjadi pada Pemerintahan Junta Militer Myanmar tersedia di <http://www.library.upnvi.ac.id/pdf/s1hi09/204613008/bab2.pdf>. Diakses pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012.

<sup>5</sup> *Ibid.*

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang dijadikan sumber penelitian yakni, **“Bagaimanakah Peran Open Society Foundations Dalam Demokratisasi di Myanmar Pasca Penolakan Hasil Pemilu Nasional Myanmar Tahun 1990.”**

#### **E. Kerangka Pemikiran/Teori yang di gunakan**

##### **A. Konsep Global Civil Society**

Secara definitif, konsep Global Civil Society merupakan konsep yang baru dan tidak memiliki batasan yang jelas mengenai apa dan siapa saja yang ada di dalamnya. Global Civil Society merupakan gerakan lintas negara, namun besar kemungkinan bahwa negara dan korporasi juga termasuk didalamnya. Oleh karena itu perlu memperhatikan konsep Global Civil Society dalam cakupan yang jelas dan ideal untuk menentukan peran Open Society Foundations sebagai Global Civil Society dalam proses demokratisasi Myanmar.

Konsep Global Civil Society didasarkan pada dua pemikiran, yaitu Global Civil Society di luar *state* atau negara dan Global Civil Society di luar *market* atau pasar. Pemikiran yang mengatakan bahwa Global Civil Society di luar *state* berasal dari pemikiran Hegel, sedangkan pemikiran yang mengatakan bahwa Global Civil Society diluar *market* berasal dari pemikiran

-----



Society tidak berada dalam ruang yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan negara dan juga pasar. Hal ini kemudian menciptakan anggapan bahwa Global Civil Society merupakan masyarakat yang non-profit karena berada diluar ruang pasar dan masyarakat yang *non-governmental* karena berada diluar ruang pemerintah.<sup>6</sup>

Namun pemikiran dari Hegel dan Gramsci ini bertolak belakang dengan pemikiran Mary Kaldor yang beranggapan bahwa Global Civil Society adalah orang-orang yang berada pada ruang negara (*state*) dan juga pada ruang pasar (*market*), Mary Kaldor juga memiliki pandangan yang cukup berbeda menyikapi konsep Global Civil Society. Bagi Kaldor, untuk memahami Global Civil Society diperlukan pemahaman konsep masyarakat sipil menurut Aristoteles. Masyarakat sipil bagi Aristoteles merupakan sebuah kondisi yang ada dan dimulai dengan kontrak sosial. Dengan demikian, masyarakat sipil merupakan masyarakat yang diperintah berdasarkan hukum yang diletakkan di atas prinsip persamaan, dan setiap orang menjadi subyek dalam hukum. Meskipun istilah Global Civil Society ini berbeda-beda namun memiliki makna yang umum, Global Civil Society adalah tentang masyarakat yang diatur berdasarkan persetujuan dari individu atau masyarakat yang berdasarkan kontrak sosial antar individu . Berdasarkan penjelasan tersebut Mary Kaldor memberikan definisi tentang konsep Global Civil Society, yaitu "*civil society is the process through which individuals negotiate, argue, struggle against or agree with each other and with the*

---

<sup>6</sup> Mary Kaldor, *The Idea Of Global Civil Society* . Sumber : *International Affairs (Royal on Behalf of*

*centres of political and economic authority. Through voluntary associations, movements, parties, unions, the individual is able to act publicly.*<sup>7</sup>

Dari penjelasan Kaldor diatas dapat dipahami bahwa Global Civil Society adalah proses di mana individu bernegosiasi, berpendapat, berjuang melawan atau setuju dengan dengan pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Melalui asosiasi sukarela, gerakan, partai- partai, serikat pekerja, individu yang dapat bertindak secara terbuka.

Mary Kaldor memberikan tiga versi mengenai Global Civil Society, yaitu :

1) Versi Aktivis dalam bentuk *social movement* atau lebih tepatnya sebagai gerakan anti-globalisasi atau apa yang disebut 'gerakan sosial baru'. Gerakan yang berkembang setelah tahun 1968 ini berkaitan dengan isu-isu baru, seperti perdamaian, perempuan, hak asasi manusia dan lingkungan. Selain itu versi aktivis ini juga memiliki perhatian terhadap permasalahan perubahan iklim, HIV/AIDS dan tanggung jawab korporasi serta bentuk-bentuk protes kontemporer. Gerakan antiglobalisasi ini mempunyai keprihatinan dengan keadilan sosial global dan berupaya melakukan proses penguatan pemerintahan global, khususnya di bidang kemanusiaan.

2) Versi Neo-Liberal yang merupakan produk versi Barat untuk memfasilitasi reformasi pasar dan menyebarkan demokrasi. Istilah tersebut dikenal sebagai “kebijakan agenda baru” lembaga-lembaga global versi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

persektif Barat. Masyarakat sipil dipahami sebagai apa yang Barat kehendaki. Agen kuncinya adalah Non-Governmental Organizations atau gerakan-gerakan sosial yang dilembagakan dan profesional. Hal ini terlihat dari mekanisme untuk memfasilitasi reformasi pasar dan pengenalan sistem demokrasi parlementer .

3) Versi Postmodern yang mengkritik Eurosentris atau sesuatu yang lahir dari konteks budaya Barat (Westernisasi) dengan melihat kemunculan pergerakan etnis dan religius sebagai bentuk Global Civil Society yang baru.<sup>8</sup>

Jika mengacu pada kategorisasi Global Civil Society menurut Mary Kaldor diatas, maka identifikasi Open Society Foundations sebagai salah satu Global Sivil Society adalah versi Neo-Liberalis yang merupakan produk versi Barat dalam hal ini jaringan Yayasan Soros untuk memfasilitasi reformasi pasar dan menyebarkan demokrasi, dimana agen atau aktor kuncinya adalah Non-Governmental Organization yang bersifat dilembagakan dan profesional.

Dalam kategorisasi Global Civil Society menurut Mary Kaldor tersebut sangat sesuai dengan Open Society Foundations, karena selain merupakan agen yang dilembagakan secara profesional melalui Yayasan Soros, fokus kerja dan peran Open Society Foundations dikawasan Asia Tenggara adalah kebijakan-kebijakan yang sangat populer di dunia barat

---

<sup>8</sup> The Idea of Global Civil Society Loc.Cit.,

yaitu hak asasi manusia, pekerja migran, buruh dan korban konflik. Selain itu Open Society Foundations juga mempromosikan reformasi pemilihan umum, melembagakan kebijakan sumber daya alam serta meningkatkan akses informasi publik.<sup>9</sup>

### **B. Konsep Transisi Demokrasi**

Transisi dari pemerintahan non-demokratis menuju pemerintahan demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah tahapan. Pada kasus tipikal kontemporer, permulaan proses ditandai dengan terjadinya krisis dan akhirnya perpecahan dalam tubuh rezim non-demokratis. Jika transisi menuju demokrasi diawali dengan kesadaran dari rezim otoriter, maka tahapan ini akan diakhiri dengan pembentukan sebuah pemerintahan yang baru berdasarkan pemilihan umum yang bebas.<sup>10</sup>

Namun prosesnya tidak berakhir di situ, rezim yang baru seringkali menjadi belum demokratis sepenuhnya. Beberapa tahapan pendalaman demokrasi (*democracy deepening*) mungkin dibutuhkan sebelum tahapan berikutnya dicapai, lagipula proses penuh menuju demokrasi yang solid memakan waktu yang lama, seringkali puluhan tahun. Dalam kasus Inggris Raya, proses keseluruhan memerlukan lebih dari dua ratus tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> About Open Society Institute Loc.Cit.,

<sup>10</sup> Georg Sorensen. Demokrasi dan Demokratisasi ( Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Berubah ). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2003. Hlm 71.

<sup>11</sup> *Ibid*.

Menurut Georg Sorensen, proses transisi dari pemerintah non-demokratis menuju pemerintahan demokratis terjadi pada tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan persiapan, yang bercirikan perjuangan politik untuk menjatuhkan rezim non-demokratis agar tercipta kehidupan masyarakat sipil yang lebih baik. Tahapan kedua yaitu tahapan keputusan di mana elemen yang jelas dari tertib demokrasi telah dibangun dan yang ketiga adalah tahapan konsolidasi, di mana demokrasi baru lebih berkembang dan akhirnya praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik.<sup>12</sup>

Tahapan pertama dalam transisi menuju demokrasi adalah tahapan persiapan (*preparatory phase*). Tahapan ini berisi apa yang pada awalnya disebut sebagai perjuangan politik yang panjang dari beberapa orang, kelompok, dan kelas untuk menentang pemerintahan yang non-demokratis. Demokrasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan lain atau dampak dari perjuangan mencapai tujuan-tujuan lainnya, seperti masyarakat yang lebih setara, distribusi kesejahteraan yang lebih baik, perluasan hak-hak dan kebebasan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dalam kasus demokratisasi di Myanmar, negara pemerintahan junta militer ini masih dalam tahap transisi demokrasi yang pertama, yaitu tahapan persiapan. Dalam tahapan ini perjuangan politik yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh perjuangan masyarakat sipil. Demokrasi sangat erat kaitannya dengan masyarakat sipil, perkembangan demokrasi pasti selalu

---

<sup>12</sup> Georg Sorensen. *Ibid* Hlm 81.

<sup>13</sup> Georg Sorensen. *Ibid* Hlm 73.

terkait dengan perkembangan masyarakat sipil. Karena sesungguhnya mesin penggerak demokrasi adalah masyarakat sipil sendiri. Dan perlu disadari penguatan masyarakat sipil harus dilakukan untuk memungkinkan rakyat bersatu dan menerapkan kekuatan sosialnya demi kehidupan yang lebih baik

Sistem politik yang terbaik bagi masyarakat yang ingin melakukan transisi kearah masyarakat terbuka adalah sistem pemerintahan yang demokratis karena didalamnya orang bebas memilih dan mengubah pemerintahan. Bentuk pemerintahan demokratis dianggap lebih cocok dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya karena menjamin kebebasan individual untuk memenuhi kebutuhan sosialnya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu Open Society Foundations sebagai sebuah organisasi non-pemerintah yang ingin menyebarkan gagasan demokrasi melaksanakan program *Burma Project/Southeast Asia Initiative* dan *Documentary Photography Project* untuk meningkatkan kesadaran Internasional tentang kondisi di Myanmar dan melakukan transisi masyarakat terbuka melalui rekonsiliasi masyarakat sipil. Program *Burma Project/Southeast Asia Initiative* ini membantu para aktivis untuk menyuarakan kepada publik tentang konstitusi dan referendum yang ilegal, pemilihan umum yang tidak demokratis dan penindasan terhadap lawan-lawan politik pemerintahan junta militer. Sedangkan program *Documentary Photography Project* berupaya memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi, dan memfasilitasi

---

<sup>14</sup> George Soros, *Zaman Kenisbian Konsekuensi Perang Terhadap Teror*. Penerbit Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta 2006 hal.55

kebebasan menyebarkan informasi dan penyediaan informasi yang memenuhi kebutuhan publik.<sup>15</sup>

Demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat Myanmar adalah demokrasi yang menjamin asas-asas kesetaraan masyarakat, distribusi kesejahteraan yang lebih baik, dan perluasan hak-hak dan kebebasan. Atas dasar tersebut Open Society Foundations menciptakan program-program yang mendukung proses rekonsiliasi masyarakat sipil tersebut sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang lebih baik.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dan dengan menggunakan pendekatan teoritik serta kerangka konseptual maka di kemukakan bahwa Open Society Foundations memiliki peran dalam demokratisasi di Myanmar yaitu membangun jaringan sipil global yang mendukung demokratisasi di Myanmar dan melakukan rekonsiliasi masyarakat sipil di Myanmar.

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam tulisan ini digunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh sehingga dapat membuktikan kebenaran hipotesanya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik

---

<sup>15</sup> Program Burma Project/Southeast Asia Initiative tersedia di <http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/burma-projectsoutheast-asia>

pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku-buku, literatur-literatur, dan artikel baik internet maupun koran, serta sumber lain yang dianggap relevan.

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I.** Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan bagian yang menjadi dasar dan pendahuluan dalam penulisan skripsi ini yaitu, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Serta diuraikan juga tentang kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Bab ini penulis akan menguraikan pembahasan mengenai sejarah dan profil Open Society Foundations, program-program Open Society Foundations, dan Jaringan Yayasan Soros.

**BAB III.** Pada bab ini akan diuraikan tentang profil negara Myanmar, munculnya pemerintahan junta militer, dan perkembangan demokrasi di Myanmar sebelum dan sesudah pemilu nasional Myanmar tahun 1990.

**BAB IV.** Pada bab ini akan diuraikan bagaimana peran Open Society

... ..



proses demokratisasi di Myanmar dan peran Open Society Foundations dalam proses rekonsiliasi masyarakat sipil di Myanmar.

DAD V Dada keb ini berisi kesimpulan dan analisa dari bab-bab